

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Investasi merupakan salah satu kegiatan yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan di masa mendatang dengan melakukan aktivitas penanaman modal pada satu periode tertentu dengan harapan modal tersebut dapat menghasilkan keuntungan dalam bentuk peningkatan nilai investasi. Salah satu investasi yang dapat dilakukan oleh investor yaitu dengan berinvestasi di pasar modal.

Pasar modal dapat menjadi tempat sebagai perantara jual beli saham dan obligasi antara investor dan perusahaan yang menerbitkan surat berharga di bursa efek. Menurut Sunariyah (2006), pasar modal merupakan tempat pertemuan antara penawaran dan permintaan surat berharga. Tempat dimana individu atau badan usaha yang memiliki kelebihan dana (*surplus fund*) dengan melakukan investasi dalam surat berharga yang ditawarkan oleh emiten. Belakangan ini pasar modal seringkali di perbincangkan oleh masyarakat Indonesia dan banyak diminati oleh kalangan muda untuk menabungkan uangnya dengan berinvestasi sehingga membuat jumlah investor pasar modal Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, hal tersebut dapat dibuktikan dengan grafik berikut :



Gambar 1. 1 Jumlah Investor Pasar Modal Indonesia
Sumber: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), 2019

Pada grafik tersebut dapat diketahui bahwa jumlah investor yang menginvestasikan uangnya ke pasar modal Indonesia mengalami kenaikan terus menerus dari tahun 2012 hingga 2019. Jumlah tersebut tidak menutup kemungkinan bisa menurun, tergantung tingkat keberhasilan dari pasar modal karena semakin berhasilnya pasar modal akan semakin banyak pula peminatnya.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan pasar modal. Menurut Husnan (1998), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pasar modal antara lain yaitu : ketersediaan sekuritas, permintaan akan sekuritas, masalah hukum dan peraturan, dan kondisi politik dan ekonomi suatu negara. Dari beberapa faktor tersebut yang mungkin telah terjadi baru-baru ini yaitu mengenai kondisi politik. Kondisi politik yang mungkin dapat mempengaruhi keberhasilan pasar modal yaitu seperti adanya peristiwa pemilihan presiden, pemilihan legislatif, pergantian pemerintahan, pengumuman kabinet atau menteri, kerusuhan politik, peperangan atau peristiwa lain yang mungkin berpengaruh pada kestabilan perekonomian negara sehingga dapat mempengaruhi harga di bursa efek dan menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan investor.

Seperti yang kita ketahui, demokrasi di Indonesia pada tahun 2019 saat ini berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilihan presiden dan pemilihan legislatif telah diselenggarakan secara serentak pada 17 April 2019. Pada tahun 2014, pemilihan legislatif dilakukan lebih dahulu pada tanggal 9 April 2014 untuk menentukan apakah para peserta pemilu bisa lolos ke parlemen atau tidak. Selain itu, untuk menentukan berapa persen suara yang didapatkan masing-masing partai. Hasil pemilihan legislatif tersebut sebagai landasan untuk menentukan komposisi partai dalam mengusung calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilihan presiden yang dilakukan tiga bulan setelahnya, 9 Juli 2014. Hal itu merujuk pada UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres (kini telah dibatalkan), partai atau koalisi partai bisa mengusung capres-cawapres apabila memiliki 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional (kumparan news, 2018)

Pemilu serentak pada tahun 2019 dilatarbelakangi oleh penggugatan UU Nomor 42/2008 tentang Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilakukan oleh akademisi Effendi Ghazali bersama Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak. Gugatan tersebut ter-register dengan nomor 14/PUU-XI/2013. Alasannya, penyelenggaraan pemilu serentak lebih efisien baik dari segi waktu maupun biaya. Berdasarkan perhitungan anggota KPU saat itu, Ferry Kurnia Rizkiyansyah yang dikutip dalam permohonan bahwa penyelenggaraan pemilu serentak dapat menghemat anggaran Rp 5 sampai Rp 10 triliun (kumparan news, 2018). Pada pemilu serentak yang dilakukan pada 17 April 2019 tersebut telah terjadi dua peristiwa yaitu: pertama peristiwa pemilihan presiden dan kedua peristiwa pemilihan legislatif.

Pada pemilihan presiden 2019 Joko Widodo kembali menjabat sebagai presiden RI, ini merupakan periode yang kedua kalinya. Dalam periode 5 tahun pertama presiden Joko Widodo memilih infrastruktur menjadi fokus utama dalam pemerintahan, beliau berpendapat bahwa “infrastruktur artinya banyak sekali dan dengan begitu kita nanti memiliki fondasi yang kuat untuk berkompetisi dengan negara lain”.(setneg.go.id,2019). Kebijakan tersebut dilanjutkan pada periode 5 tahun keduanya dengan mengeluarkan RPJMN 2020-2024 atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dengan memiliki tujuh agenda pembangunan, diantaranya yaitu : ketahanan ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah, kualitas SDM, revolusi mental, memperkuat infrastruktur serta pelayanan dasar, lingkungan hidup, dan yang terakhir memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan.(liputan6.com,2019).

Peristiwa kedua, pemilihan legislatif yang dilakukan pada tahun 2019 ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya pemenang pemilu menjadi ketua DPR, pemenang nomor selanjutnya menjadi wakilnya maka tak heran jika pada tahun sebelumnya proses pemilihan paket pimpinan DPR berlangsung lama bahkan diwarnai dengan keributan. Namun, pada tahun 2019 saat ini para wakil rakyat yang terpilih dalam pemilihan umum akan dilantik terlebih dahulu setelah itu dilakukan penentuan ketua DPR sehingga dapat dipastikan prosesnya tidak akan menimbulkan keributan saat pemilihan

berlangsung. Mekanisme nya mengacu pada perolehan suara pemilu melalui partai politik, partai politik yang memenangkan pemilu secara otomatis akan menjadi pimpinan dengan cara mengajukan nama anggotanya. Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. (kompas.com, 2019).

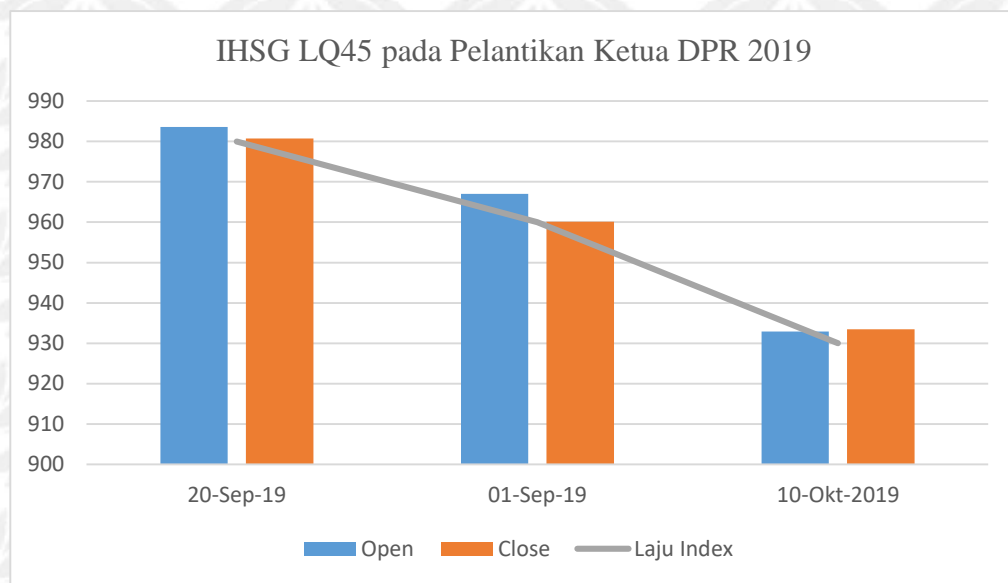
Keputusan yang telah diambil dalam sidang paripurna DPR, 1 Oktober 2019 menetapkan Puan Maharani resmi menjadi ketua DPR periode 2019-2024. Naiknya politisi PDI Perjuangan sebagai ketua DPR seiring perolehan suara terbanyak dalam Pileg 2019. Puan Maharani tercatat menjadi ketua DPR perempuan pertama Indonesia. Sebelum menjabat sebagai Ketua DPR, Puan menempati posisi sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) dalam kabinet kerja 2014-2019. Pada tahun 2018, Puan mendeklarasikan Gerakan Ibu Bangsa Membaca yang bertujuan mengajak ibu-ibu seluruh Indonesia untuk giat membaca. Salah satu programnya adalah pembacaan kutipan dari buku-buku tertentu oleh 26 tokoh perempuan yang dikenal publik. Puan termasuk salah satu dari tokoh tersebut. Selain itu, Puan juga membuka Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Fair yang bertujuan memperluas peluang kerja perempuan industri kreatif. Pada pembukaan Kowani Fair 2018 Puan mengatakan, kowani tersebut sebagai federasi dari 91 organisasi perempuan di Indonesia memiliki peran strategis dalam pemberdayaan perempuan. Saya sangat mengapresiasi Kowani Fair.

Pernyataan-pernyataan Puan menunjukkan perhatiannya pada isu representasi perempuan di bidang sosial dan politik. Namun Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLB) Jumisih berpendapat, bahwa Puan belum menunjukkan kepeduliannya pada perempuan kelas pekerja. Pekerja perempuan masih menghadapi berbagai masalah seperti cuti haid yang tidak diberikan, jam kerja yang melebihi aturan, dan sistem tenaga *outsourcing* yang menyebabkan pemangkasan gaji. Menurut saya kesetaraan tidak hanya bisa dilihat dari kedudukan politik saja, tetapi dalam kehidupan dan tindakan seluruh lingkup masyarakat yang heterogen (Jumisih, 2019).

Terpilihnya Puan Maharani tidak serta merta terpilih begitu saja, tetapi memiliki alasan yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan saat pengambilan keputusan. Alasan utama yaitu, Puan Maharani merupakan salah satu anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang pada waktu Pileg 2019 memperoleh jumlah suara terbanyak sebesar 19,33%. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak berhak mengajukan nama calon ketua DPR. Bukan hanya itu, ada beberapa alasan pendukung Puan Maharani terpilih sebagai ketua DPR yaitu, Puan merupakan cucu dari Ir. Soekarno Presiden pertama RI, putri dari Presiden RI Ke-5 Megawati Soekarnoputri, dan merupakan orang dekat Jokowi Presiden ke-7 RI (kompasiana, n.d.). Hal tersebut tentu dapat menjadi sorotan oleh para investor karena para investor tidak hanya melihat dari internal perusahaan saja melainkan dari eksternal perusahaan. Salah satu informasi eksternal yang diperhatikan oleh investor adalah informasi politik dari kawasan perusahaan apabila politik di kawasan perusahaan tersebut dianggap baik maka akan membuat para investor bersedia menginvestasikan modalnya.

Peristiwa-peristiwa politik yang terjadi seperti pelantikan Presiden Joko Widodo dan penetapan Puan Maharani sebagai ketua DPR pada periode 2019-2024 merupakan faktor eksternal yang perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi harga saham di bursa efek. Hal tersebut terbukti pada saat pelantikan dan peresmian ketua DPR, Indonesia berada pada kondisi politik yang tidak pasti karena pada pemilihannya dipilih langsung oleh pejabat negara tidak dipilih oleh masyarakat sendiri. Masyarakat hanya memberikan suaranya kepada partai politiknya. Partai politik yang menang berhak mengajukan nama ketua yang ingin dijadikan sebagai ketua DPR tersebut.

Ketidak pastian kondisi politik dapat menyebabkan sentimen pasar negatif terhadap bursa begitu pula sebaliknya, apabila kondisi politik kondusif dapat menyebabkan sentimen pasar positif terhadap bursa. Pada saat jelang pelantikan ketua DPR 1 Oktober 2019 indeks LQ45 mengalami penurunan dari sebelum pelantikan dan berimbas hingga sesudah pelantikan, hal itu dapat dilihat dari grafik berikut :



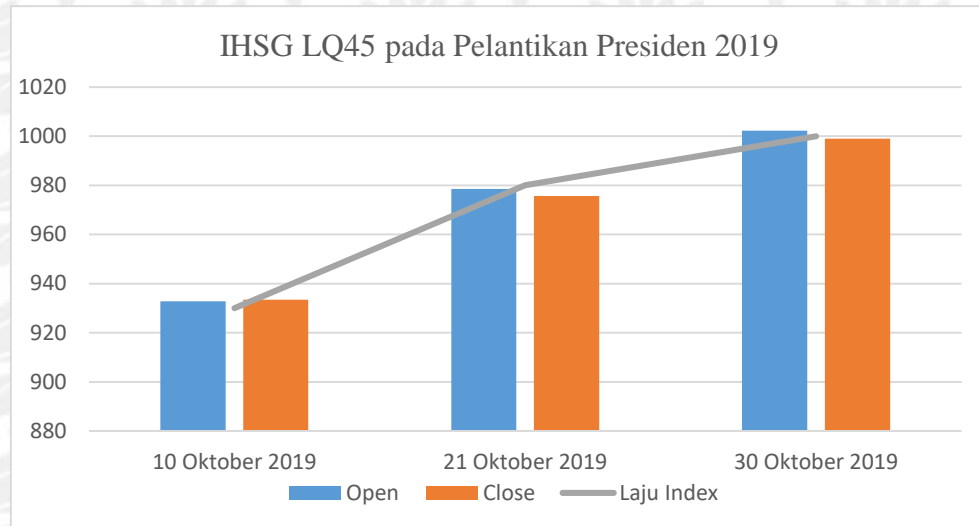
Gambar 1. 2 Laju IHSG LQ45 pada Pelantikan Ketua DPR 2019

Sumber: Mandiri Sekuritas Online Trading (MOST), 2019

Pada grafik tersebut dapat dilihat bahwa pergerakan IHSG sebelum peristiwa pelantikan berada pada close yang lumayan tinggi yaitu 980,766 pada 20 september 2019, turun menjadi 960,154 pada 1 Oktober 2019 dan semakin turun ke angka 933,421 pada 10 oktober 2019 sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh adanya pelantikan ketua DPR 2019 tersebut masih membawa sentimen negatif terhadap bursa.

Berbeda dengan pada saat pelantikan presiden, pada saat pelantikan presiden Indonesia berada pada kondisi yang kondusif meskipun ada beberapa oknum yang tidak setuju Jokowi menjabat sebagai presiden untuk dua kali masa

jabatan namun pada saat pelantikan Jokowi terjadi sentimen pasar positif terhadap bursa, hal tersebut dapat dilihat dari grafik berikut :



Gambar 1. 3 Laju IHSG LQ45 pada Pelantikan Presiden 2019

Sumber: Mandiri Sekuritas Online Trading (MOST), 2019

Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa IHSG mengalami perbaikan pada saat menjelang pelantikan presiden 2019, dari 933,421 pada 10 Oktober 2019 menjadi 975,692 pada 21 Oktober dan kenaikan tersebut masih bertahan hingga 30 Oktober 2019 dengan angka 999,008 sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi sentimen pasar positif pada saham.

Tidak heran jika saham terjadi sentimen positif pada saat pelantikan Presiden Jokowi karena hal itu pernah terjadi pada pelantikan Presiden Jokowi pada masa jabatan yang pertama 20 Oktober 2014 lalu. Saham di bursa efek melonjak naik pada saat itu dan dianggap sebagai Jokowi *Effect*. Meskipun kenaikan tidak terlalu signifikan namun hal itu menjadi perbincangan hangat oleh para investor. Istilah Jokowi *Effect* diciptakan oleh media untuk mendeskripsikan kepopuleran mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terhadap per-politikan dan perekonomian Indonesia. Dalam bidang politik, pendeklarasian Joko Widodo sebagai calon presiden dalam pemilihan umum presiden Indonesia 2014 lalu diyakini dapat mendongkrak suara PDIP hingga 30%. Selain itu, di pasar modal efek Jokowi dikatakan dapat meningkatkan

keinginan penanam modal untuk menanamkan modalnya karena Joko Widodo dinilai memiliki rekam jejak yang bersih, pro-rakyat dan tegas.

Dari deskripsi diatas, dapat diasumsikan bahwa peristiwa politik di suatu negara dapat memberikan sentimen bagi investor untuk mempertimbangkan penanaman modalnya di Indonesia. Hidayat (2018) dalam jurnalnya mengenai Analisis Perbedaan *Abnormal Return* Sebelum dan Sesudah Peristiwa Politik pada Saham LQ45 di BEI dengan mengangkat peristiwa politik Aksi Damai 212 dan Kedatangan Raja Salman menunjukkan bahwa dari adanya kedua peristiwa tersebut terdapat beberapa sektor yang mengalami penurunan dan peningkatan *Abnormal return* sebelum dan sesudah peristiwa terjadi.

Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan Suharyati & Hermuningsih dalam jurnalnya mengenai Analisis Perbedaan *Abnormal Return* dan Volume Perdagangan Saham Sebelum dan Sesudah Pilpres 9 Juli 2014 Studi pada Perusahaan Milik Bakrie Group dan MNC Group menunjukkan tidak terdapat perbedaan rata-rata *abnormal return* sebelum dan sesudah pilpres 9 Juli 2014 pada perusahaan Bakrie Group maupun milik MNC Group dan hanya perusahaan milik MNC Group yang terdapat perbedaan rata-rata volume perdagangan saham sebelum dan sesudah pilpres 9 Juli 2014. Hasil yang sama juga disimpulkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Sihotang & Mekel (2015) dalam jurnal mengenai Reaksi Pasar Modal Terhadap Pemilihan Umum Presiden Tanggal 9 Juli 2014 di Indonesia Studi di Perusahaan Konstruksi, Infrastruktur dan Utilitas pada BEI Jakarta menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara *abnormal return* sebelum dan sesudah pemilu presiden sedangkan pada *trading volume activity* terdapat perbedaan yang signifikan antara *trading volume activity* sebelum dan sesudah pemilu presiden.

Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh Pratama dkk (2015) dalam jurnalnya mengenai Reaksi Pasar Modal Indonesia Terhadap Peristiwa Politik Pelantikan Jokowi sebagai Presiden Indonesia ke-7 menyimpulkan bahwa *abnormal return* pada periode peristiwa bervariasi namun tidak signifikan secara statistik pada peristiwa sebelum dan sesudah pelantikan presiden Jokowi.

Pada umumnya informasi yang dibutuhkan investor dapat berasal dari kondisi internal maupun eksternal perusahaan (emiten). Menurut Hartono (2017), pengujian kandungan informasi dilakukan untuk melihat reaksi dari suatu pengumuman. Jika pengumuman tersebut mengandung informasi, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya perubahan harga dari sekuritas bersangkutan. Reaksi ini dapat diukur dengan menggunakan return sebagai nilai perubahan harga atau dengan menggunakan *abnormal return*. Jika digunakan *abnormal return*, maka dapat dikatakan bahwa suatu pengumuman yang mempunyai kandungan informasi akan memberikan *abnormal return* kepada pasar. Sebaliknya yang tidak mengandung informasi tidak akan memberikan *abnormal return* kepada pasar.

Abnormal return merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur reaksi pasar akibat terjadi suatu peristiwa tertentu. *Abnormal return* merupakan kelebihan dari return sesungguhnya yang dihasilkan dari suatu investasi atas *return* yang diharapkan (diekspektasikan). *Return* normal merupakan *return* yang terjadi pada saat situasi normal dan tidak terjadi suatu peristiwa tertentu. Bila suatu peristiwa tertentu yang terjadi mengandung suatu informasi baik (*good news*) akan berdampak terhadap kenaikan *abnormal return*, dan akan berdampak penurunan *abnormal return* bila informasi tersebut dianggap buruk (*bad news*).

Penelitian dilakukan untuk meneliti pengaruh politik terhadap *abnormal return* yang dilakukan melalui *event study*. *Event study* ini dilakukan untuk mengamati pergerakan harga saham di pasar modal ketika terjadi suatu peristiwa dan mengetahui apakah terdapat imbal balik investasi yang tidak biasa yang diterima oleh para investor akibat terjadinya peristiwa politik dengan melihat kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan terkait agenda pembangunan nasional 2020-2024. Hal tersebut mendorong peneliti untuk meneliti Analisis Perbedaan *Abnormal Return* Sebelum dan Sesudah Peristiwa Politik Pelantikan Presiden dan Pelantikan Ketua DPR 2019 pada Saham Perusahaan LQ-45 di Bursa Efek Indonesia sebanyak 45 perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada *abnormal return* saham sebelum dan sesudah peristiwa politik pelantikan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin?
2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada *abnormal return* saham sebelum dan sesudah peristiwa politik penetapan Puan Maharani sebagai ketua DPR 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis perbedaan *abnormal return* sebelum dan sesudah peristiwa politik pelantikan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
2. Untuk menguji dan menganalisis perbedaan *abnormal return* sebelum dan sesudah peristiwa politik penetapan Puan Maharani sebagai ketua DPR 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai kegunaan analisis perbedaan *abnormal return* dalam menentukan return saham ketika terjadi suatu peristiwa bagi Manajemen, dan bagi Investor maupun calon investor diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan Bursa Efek sehingga dapat memperoleh keuntungan yang lebih

2. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan tentang prediksi *return* saham dengan menggunakan analisis perbedaan *abnormal return*.